

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dunia pendidikan merupakan bidang yang penting untuk diperhatikan karena pendidikan merupakan sarana untuk mendapatkan pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karenanya, seorang guru memiliki tugas, tanggung jawab yang besar, terlebih karena guru harus menjadi teladan bagi murid-muridnya.

Untuk dapat menjalankan tugas sebagai guru, dibutuhkan kompetensi, pengalaman di bidangnya, dan kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran. Sebenarnya, menjalankan pekerjaan sebagai guru identik dengan pengabdian. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia ( KBBI) dikatakan Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar dan mendidik. Pasal 1 Undang-Undang no.14 tahun 2005 “ Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa-siswi pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (<http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/guru>, diunduh pada 12 February 2013)

Di Indonesia terdapat tiga status guru, yaitu guru pegawai negeri sipil (PNS), guru calon pegawai negeri sipil (CPNS), dan guru honorer. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1, tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat

lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian pemerintah perlu mengatur jumlah pengangkatan dan pendapatan tenaga honorer agar tidak membengkakkan APBN maupun APBD. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, dan secara jelas tertulis dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dijelaskan dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat 1 bahwa pengangkatan tenaga honorer yang pertama diprioritaskan adalah guru.

Dalam bidang pendidikan, PP Nomor 48 Tahun 2005 merupakan kondisi yang dilematis. Revisi terhadap PP Nomor 48 Tahun 2005 mengenai masa kerja guru honorer minimal telah bekerja selama 20 tahun diganti dalam PP Nomor 43 Tahun 2007 menjadi masa bekerja minimal 1 tahun. Selanjutnya dalam PP Nomor 43 Tahun 2007 juga merevisi seleksi guru honorer hanya membutuhkan seleksi administrasi. Namun dalam pelaksanaannya, pengangkatan guru honorer hanya diperbolehkan berdasarkan Surat Keputusan dari kepala sekolah yang menerima guru honorer tersebut. Dengan demikian payung hukum dan pelaksanaan dalam pengangkatan guru honorer menjadi PNS yang tidak jelas ini harus diperhatikan karena seiring pertumbuhan penduduk, kebutuhan tenaga honorer seperti guru

tentu juga bertambah.  
(<http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/128.pdf>, diakses 12 February 2013)

Guru honorer yang ada di Indonesia membentuk beberapa wadah yaitu Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Komite Perjuangan Guru Honorer (KPGH) Jawa Barat, Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH), dan Asosiasi Guru Honorer Indonesia (<http://www.tribunnews.com>, diakses 12 February 2013). Latar belakang dibentuknya AGHI dipicu oleh kurangnya persatuan dan kesatuan guru honorer dalam memperoleh informasi mengenai peraturan, jadwal, dan proses yang harus dilalui oleh guru honorer saat ingin memroses status sebagai PNS. AGHI dipandang dapat mempermudah tersebarnya informasi yang diperlukan kepada guru-guru honorer.

Visi dan misi AGHI ini adalah memererat silaturahmi antar semua guru honorer di Bandung dengan cita-cita utama yaitu diangkatnya guru-guru honorer menjadi PNS. Anggota AGHI di Bandung berjumlah 9.740 orang, dan 7.400 orang diantaranya telah bekerja di sekolah-sekolah negeri dan 2.340 sisanya bekerja di sekolah swasta. Anggota AGHI Bandung terdiri atas para guru honorer di TK, SD, SMP dan SMA di Kota Bandung.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua AGHI, Guru- guru honorer memiliki hambatan dalam memroses status sebagai PNS. Guru honorer harus menjalani serangkaian tahap sebagai prasyarat dan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Sebelum menjadi PNS, guru honorer yang dianggap telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sesuai peraturan Menpan nomor 5 tahun 2010 dapat

mengajukan diri untuk mengikuti tes CPNS. Bagi yang lulus, akan segera berstatus CPNS. Tahap selanjutnya untuk menjadi PNS harus memenuhi beberapa persyaratan dan menjalani masa percobaan dalam waktu sekurang-kurangnya satu tahun. Persyaratan yang harus dijalani ditentukan oleh dinas pendidikan kota bersangkutan yang kemudian disampaikan pada sekolah-sekolah untuk memberikan tugas-tugas kepada guru CPNS yang dipekerjakan di sekolah masing-masing. Jika berhasil memenuhi seluruh persyaratan dan mampu menjalankan tugas-tugas yang diberikan dengan baik dalam satu tahun, maka kepala sekolah akan mengajukan kepada dinas pendidikan setempat untuk pengangkatan guru bersangkutan sebagai PNS.

Ketua AGHI menjelaskan banyak diantara guru honorer yang sudah memenuhi semua persyaratan namun belum juga dapat diangkat menjadi PNS padahal sudah mengabdikan selama bertahun-tahun. Kenyataan lainnya yang dialami oleh guru-guru honorer adalah tidak diperolehnya honor secara rutin, dengan besaran yang cenderung di bawah upah minimum regional ( UMR ). Guru –guru honorer tidak mendapatkan tunjangan seperti halnya guru PNS. Penghasilan yang didapat oleh guru-guru honorer setiap jenjangnya berbeda-beda. Sebagai contoh, penghasilan guru SD berada dalam kisaran Rp. 150.000,00,- per-bulan; sedangkan penghasilan guru SMP dan SMA dihitung per-jam mengajar. Selain itu dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, para guru honorer seringkali mengalami kekurangan sarana dan prasarana sehingga menemui kesulitan dalam penyampaian materi di kelas seperti kurangnya buku materi pembelajaran bagi anak-anak dan peralatan mengajar di dalam kelas. Pernyataan mengenai kesulitan

dalam memroses status PNS dan ketidakjelasan kesejahteraan guru honorer senada dengan ungkapan dari anggota Komite III DPD dalam situs suara merdeka.com, "Posisi guru honorer antara ada dan tiada. Mereka dibutuhkan untuk mengisi kekurangan guru, tapi secara kepegawaian mereka tidak ada. Dari sisi kesejahteraan juga tidak dijamin".

Dari hasil *survey* dengan cara FGD ( *Focussed Group Discussion* ) terhadap 10 orang guru honorer anggota AGHI, diperoleh gambaran tentang keadaan guru honorer. Diawali dengan menanyakan alasan ingin menjadi guru. Jawaban yang diperoleh adalah panggilan hati yang ingin memajukan bangsa dan negara agar para pemuda dan pemudi Indonesia cerdas, karena desakan orangtua jika menjadi seorang guru akan dipandang oleh masyarakat, karena berlatarbelakang keluarga yang dulunya kebanyakan berprofesi sebagai guru dan ingin anaknya menjadi guru mengikuti jejak orang tuanya, karena memiliki ijazah ilmu kependidikan, untuk mengisi waktu luang (bagi guru wanita), serta bekerja sebagai guru berdasarkan amanat yang terdapat dalam PP 48/2003 dan PP 43/2007 bahwa semua guru honorer akan diangkat menjadi CPNS. Selain itu, alasan guru-guru honorer bertahan adalah besarnya harapan bahwa suatu saat dapat diangkat menjadi CPNS melalui jalur honorer, atau menunggu peluang untuk mengikuti dan lulus tes CPNS melalui formasi umum yang diselenggarakan pihak pemerintah. Setelah menjadi CPNS maka guru honorer akan diangkat menjadi PNS ,karena jika menjadi PNS kesehatan, jaminan keluarga, jaminan sosial, dan jaminan hari tua ( pensiunan) akan terjamin dari pemerintah.

Guru-guru honorer memertahankan statusnya sebagai ‘pahlawan tanpa tanda jasa,’ dan menjalankan profesi dengan ikhlas, menganggap pengabdianya sebagai amal ibadah. Tekad dan pandangan seperti inilah yang menjadi pijakan utama mengapa para guru honorer tetap bertahan menekuni profesi yang tidak memberinya kepastian tentang pengangkatan status kepegawaian.

Ketua AGHI menjelaskan, sebenarnya tugas Guru tetap dan Guru Honorer adalah sama, yaitu bertanggungjawab dalam mencerdaskan anak bangsa yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Guru honorer pun memiliki tugas yang sama dengan guru PNS, yaitu mengajar sejak pukul tujuh pagi dan berakhir pada pukul dua siang. Kenyataannya di lapangan, para guru honorer seringkali diminta bantuan untuk mengerjakan tugas-tugas di luar jam kerja resmi, misalnya mengerjakan tugas-tugas administrasi yang seharusnya merupakan tugas tata usaha. Tidak jarang pula guru honorer diperlakukan sebagai guru cadangan untuk menggantikan tugas guru tetap yang berhalangan hadir mengajar di kelas.

Semua beban tugas tambahan ini tidak dapat ditolak karena sebagai guru honorer harus bersedia memberikan kontribusi positif bagi operasionalisasi sekolah. Selain itu, tugas ‘tambahan’ itu sesungguhnya harus dikerjakan untuk menghindari sanksi dari pihak kepala sekolah. Dalam hal ini, Kepala Sekolah bisa saja mengambil keputusan secara sepihak, misalnya sewaktu-waktu memutuskan hubungan kerja guru honorer tersebut. Guru honorer pun dapat diberhentikan bila ada guru baru yang lebih potensial. Selain itu, besaran honor yang diterima sangatlah tidak signifikan, juga tidak diterima secara rutin. Akibatnya, kesejahteraan guru honorer kurang terjamin sehingga banyak

diantaranya yang harus bekerja sambilan sebagai 'tukang ojeg' atau bekerja serabutan, atau terpaksa berhutang guna memenuhi kebutuhan hidup.

Ketidakadilan upah yang diterima oleh guru honorer menjadi masalah serius, apalagi jika melihat tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh guru PNS dengan guru honorer adalah relatif sama. Upah kurang layak yang diterima oleh guru honorer menunjukkan adanya kesalahan sistem dalam dunia pendidikan di Indonesia. Selama ini pemerintah hanya peduli dengan nasib para guru PNS, sedangkan guru honorer ditelantarkan. Padahal tanpa adanya guru honorer roda pembelajaran di sekolah-sekolah tidak akan berjalan. Hal tersebut harus diakui oleh pemerintah, karena jumlah guru PNS relatif lebih sedikit dibandingkan dengan keberadaan guru honorer.

Di pihak lain, ditemukan juga adanya pengalaman yang dinilai negatif yang dirasakan oleh para guru honorer. Misalnya tidak mendapat jaminan sosial dan tunjangan struktural karena tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk melindungi kesejahteraan guru honorer. Para guru honorer tidak mendapat asuransi kesehatan sebagaimana yang didapatkan oleh setiap PNS. Jika para guru honorer mengalami gangguan kesehatan, maka harus membiayainya sendiri padahal kondisi keuangan terbatas, tidak jarang pula ada diantara guru honorer yang terpaksa harus meminjam uang kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan mendesak karena mengalami kesulitan terkait persyaratan jika ingin meminjam uang kepada bank atau koperasi. Para guru honorer juga tidak mendapatkan tunjangan-tunjangan kesejahteraan lainnya (berbeda dengan guru PNS). Selain itu, para guru honorer mengalami kesulitan negosiasi jika ada anaknya yang akan

memasuki jenjang pendidikan SMP atau SMA karena guru honorer tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kepegawaian), sedangkan guru PNS lebih mudah dalam hal tersebut.

Paparan di atas mengindikasikan bahwa guru honorer berada dalam situasi kehidupan yang kurang menguntungkan, situasi yang diwarnai ketidaknyamanan, atau kemalangan. Guru-guru honorer mencemaskan masa depannya, dibayang-bayangi oleh perasaan was-was bila sewaktu-waktu diputus hubungan kerjanya oleh pihak sekolah tempatnya mengabdikan, selain harus menghadapi kenyataan ketidakpastian dalam hal pengangkatan status kepegawaiannya. Berhadapan dengan situasi *adversity* tersebut, mengharuskan para guru honorer mengembangkan resiliensi atau kekenyalan dalam menghadapi situasi kurang menguntungkan ini.

*Resiliency* adalah “*Personal Strengths*”, merujuk pada daya tahan seseorang dalam menghadapi hambatan atau tantangan yang secara terus-menerus hadir dalam kehidupannya (Bonnie Benard, 2004). *Resiliency* tertuju pada pengembangan positif yang berhubungan dengan kapasitas bawaan dari kekuatan individu secara pribadi (Masten & Coatsworth, 1980). Ini artinya, secara potensial setiap manusia memiliki daya untuk kenyal menghadapi situasi-situasi tidak menguntungkan dalam kehidupannya. Potensi ini dapat berkembang optimal atau tidak ditentukan oleh bagaimana kontribusi sumber daya internal dan eksternal dari individu bersangkutan. Individu yang resilien, akan terukur melalui kapabilitasnya dalam mengekspresikan empat aspek, yaitu kemampuan *sosial*



*competence, problem solving skills, autonomy, dan sense of purpose.* (Bonnie Benard, 2004)

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk dapat beradaptasi dengan baik dan mampu berfungsi secara baik di tengah situasi yang menekan dan banyak halangan dan rintangan. Keterampilan memecahkan masalah adalah kemampuan guru untuk memiliki pelbagai cara yang dilakukan guna mencari jalan ke luar dari masalah yang dihadapinya. Kemandirian adalah seberapa besar kemampuan guru untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri tanpa bergantung pada orang lain dan merasa memiliki kemampuan untuk mengendalikan pelbagai keadaan di sekitarnya. Tujuan ke arah masa depan yang lebih baik adalah kemampuan guru untuk mengarahkan pikiran dan tindakannya ke arah tujuan yang ingin diraih dengan mengembangkan sikap-sikap optimistik dan kreatif bahwasanya hidupnya memiliki makna.

Guru honorer yang telah melewati periode waktu bertahun-tahun menjalani profesinya namun tidak kunjung memperoleh kepastian tentang saat pengangkatannya sebagai guru berstatus PNS, mengindikasikan individu yang resilien. Oleh karenanya penulis berkeinginan melakukan penelitian empirik tentang bagaimanakah gambaran resiliensi para guru honorer yang bernaung dalam asosiasi di Asosiasi Guru Honorer Indonesia (AGHI) Kota Bandung.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pada penelitian ini ingin diketahui bagaimanakah gambaran derajat resiliensi pada Guru Honorer di Asosiasi Guru Honorer Indonesia di Kota Bandung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud melakukan pengukuran terhadap resiliensi Guru Honorer di AGHI Kota Bandung, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang derajat resiliensi berikut kekuatan aspek-aspeknya: kompetensi sosial, keterampilan memecahkan masalah, kemandirian, dan tujuan & masa depan yang lebih baik.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

- a) Menerapkan konsep resiliensi pada guru honorer guna memperoleh pemahaman tentang fenomena ini pada Asosiasi Guru honorer Indonesia.
- b) Memberikan masukan bagi peneliti lain yang ingin mengetahui atau meneliti lebih lanjut tentang resiliensi pada guru honorer.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- a) Memberi informasi kepada pimpinan AGHI Kota Bandung mengenai gambaran resiliensi pada guru honorer .
- b) Bagi para guru-guru honorer, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang resiliensi pada dirinya, untuk ditindaklanjuti bagi pengembangan diri.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Kehidupan manusia akan mengalami tahapan-tahapan perkembangan. Di setiap tahap perkembangan manusia akan memiliki tugas tersendiri. Tahap perkembangan dimulai dari masa konsepsi, kemudian kelahiran, anak-anak, remaja, dewasa hingga akhir hayatnya. Kajian yang akan diteliti kali ini adalah mengenai tahap perkembangan dewasa awal, yang memiliki rentang usia antara 20-40 tahun (Santrock, 2002). Salah satu tugas perkembangan seseorang yang telah memasuki masa dewasa adalah memasuki dunia kerja dan karir. Seseorang mulai mengeksplorasi kemungkinan karir yang ada dan harus siap untuk menentukan karir yang tepat bagi dirinya. Setelah menemukan karir yang tepat, seseorang berusaha dan bekerja keras untuk membangun dan bergerak menaiki tangga karir. Demikian pula seorang guru menentukan pilihan untuk bekerja sebagai guru karena profesi guru merupakan profesi yang terbilang mulia diantara pekerjaan lainnya, karena di tangan gurulah masa depan generasi penerus bangsa ini ditentukan. Maju mundurnya pendidikan juga ditentukan oleh guru. Namun di balik tugas mulia terdapat kondisi nyata bahwa sebagian besar guru di Indonesia masih berstatus guru honorer.

Guru honorer adalah guru tidak tetap yang belum berstatus minimal sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dan memperoleh honor yang jauh dari layak. Guru honorer rela mengabdikan sebagai tenaga sukarela demi diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui jalur honorer, atau menunggu peluang untuk lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil formasi umum. Situasi demikian juga dialami oleh guru-guru honorer yang tergabung dalam AGHI Kota Bandung.

Selama bertahun-tahun bekerja sebagai guru honorer, para guru anggota AGHI Kota Bandung merasa bangga karena pekerjaannya masih dipandang positif, terhormat, dan mulia oleh sebagian anggota masyarakat. Profesi guru merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui jalur pendidikan, yang oleh karenanya guru memperoleh predikat sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Akan tetapi di sisi lain, para guru honorer mengalami kendala yang cukup besar di dalam melaksanakan tugas mulia tersebut.

Kendala ini terutama bermula dari keberadaan statusnya yang tidak kunjung berubah, yaitu juga mengalami pengangkatan menjadi guru PNS padahal telah menjalankan beban tugas dan tanggung jawab yang setara dengan guru PNS. Bahkan tidak jarang, guru honorer harus mengerjakan tugas di luar tanggung jawabnya sebagai guru. Selain itu status sebagai guru honorer tidak memberikan kepuasan secara moril maupun materil. Padahal sebagai manusia pada umumnya, guru honorer didesak oleh pelbagai kebutuhan hidup yang sedikit banyak dapat diatasi bila status kepegawaiannya menjadi jelas, misalnya berhasil diangkat sebagai PNS setelah sekian lama mengabdikan dirinya sebagai guru honorer.

Ketidakjelasan status sebagai guru honorer ini dianggap memberikan ancaman terhadap kehidupannya, termasuk masalah kesejahteraan, persoalan yang terkait dengan kepastian masa depan karir, dan masa depan keluarganya. Oleh karena itu ketidakjelasan status ini dapat dihayati sebagai keadaan tidak menyenangkan, ketidaknyamanan, dan ketidakberuntungan yang kesemuanya dapat dikategorikan sebagai situasi *adversity*. Individu yang berada dalam situasi kurang menguntungkan atau kurang nyaman, atau kurang menyenangkan ini akan

berupaya untuk beradaptasi. Kemampuan seseorang untuk beradaptasi terhadap situasi yang menekan atau tidak menyenangkan dalam kehidupannya merupakan manifestasi dari resiliensi.

Resiliensi merupakan kemampuan universal yang dimiliki oleh semua orang (Bonnie Benard, 2004). Kemampuan untuk resilien ini dapat dilihat dari empat kategori yang ada dalam "*Personal Strength*" atau manifestasi dari resiliensi, yakni kompetensi Sosial, keterampilan memecahkan masalah, kemandirian, dan tujuan dan masa depan yang lebih baik (Bonnie Benard, 2004). Jika kekuatan resiliensi ini diterapkan pada guru honorer maka dapat digunakan untuk melihat berbagai kemungkinan dari pengembangan yang ingin dicapai oleh guru honorer, yang berkaitan dengan kebijakan, dukungan, dan peluang yang tersedia.

Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk dapat beradaptasi dengan baik dan mampu berfungsi secara baik di tengah situasi yang menekan dan banyak halangan dan rintangan. Dalam kompetensi sosial terdapat empat sub aspek yaitu responsiveness, communication, empathy and caring, compassion, altruism, and forgiveness. *Responsiveness* adalah kemampuan guru honorer mendapatkan respon dari orang lain dan beradaptasi dengan lingkungannya. *Communication* adalah kemampuan guru honorer membangun hubungan interpersonal dalam membangun *relationship*. *Empathy and caring* adalah kemampuan guru honorer mengetahui apa yang dirasakan orang lain, memahami perspektif orang lain, dan memperhatikan orang disekitarnya. *Compassion, altruism, dan forgiveness* adalah kemampuan guru honorer bertanggung jawab, memiliki solusi dalam menghadapi

konflik, dan keinginan atau kemauan untuk memperhatikan dan menolong orang yang membutuhkan bantuan.

Keterampilan memecahkan masalah merujuk pada pelbagai cara yang dilakukan guru honorer guna mencari jalan ke luar dari masalah yang dihadapinya. Keterampilan memecahkan masalah ini memiliki empat subaspek, yaitu *Planning*, *Flexibility*, *Resourcefulness*, dan *critical thinking insight*. *Planning* adalah kemampuan guru honorer untuk menetapkan atau menyusun langkah-langkah bagi masa depannya. *Flexibility* adalah kemampuan guru honorer untuk dapat melihat pilihan-pilihan penyelesaian yang tersedia atas masalah yang tengah dihadapi dan mengupayakan pilihan terbaik. *Resourcefulness* adalah kemampuan guru honorer mengenali sumber daya eksternal dan sumber-sumber dukungan atas masalah yang dihadapi dalam kehidupan. *Critical thinking insight* adalah kemampuan berpikir, kebiasaan analitik, dan pendapat tentang pemahaman suatu konteks. *Critical thinking and insight* adalah bagian dari keterampilan memecahkan masalah yang muncul apabila seseorang dihadapkan pada situasi nyata sehingga pernyataan-pernyataan yang ditampilkan dalam bentuk *item* tidak bisa mengukur keterampilan ini secara nyata.

Kemandirian merujuk pada seberapa besar kemampuan responden bertindak atas inisiatifnya sendiri tanpa bergantung pada orang lain dan merasa memiliki kemampuan untuk mengendalikan pelbagai keadaan di sekitarnya. Kemandirian ini memiliki enam sub aspek, yaitu *Positive Identity*, *Internal Locus of Control and Initiative*, *Self-Efficacy and Mastery*, *Adaptive distancing resistance*, *Self awareness mindfulness*, dan *humor*. *Positive Identity* adalah

kemampuan guru honorer memberikan penilaian atas diri dan kapasitasnya secara menyeluruh. *Internal Locus of Control and Initiative* adalah kemampuan guru honorer menilai seberapa besar kemampuannya untuk mengendalikan kejadian dalam kehidupannya berdasarkan kekuatan yang dimilikinya sendiri dan berinisiatif atas dasar kekuatan internalnya. *Self-Efficacy and Mastery* adalah keyakinan guru honorer akan kemampuannya dan merasa berkompeten dalam mengendalikan kehidupannya. *Adaptive distancing resistance* adalah kemampuan secara emosional untuk melepaskan diri dari orangtua dan sekolah. *Adaptive distancing resistance* bisa digali jika penulis memilih data tentang latar belakang keluarga responden, khususnya apabila responden tumbuh dan berkembang dalam keluarga bermasalah. Akan tetapi mengingat data yang dimaksud tidak dimiliki maka penulis tidak menggali data ini. *Self awareness mindfulness* adalah kemampuan mengamati apa yang dipikirkan orang lain, memerhatikan suasana hati, dan kebutuhan seseorang yang tampak tanpa melibatkan emosi. *Self awareness mindfulness* merupakan bagian dari kecerdasan emosional, sehingga untuk melakukan pengukuran terhadap sub aspek ini perlu memerhitungkan banyak kualitas yang tercakup di dalam kecerdasan emosional. Banyaknya kualitas yang harus diperhitungkan mengakibatkan item harus diturunkan menjadi tidak sederhana, sehingga penulis memutuskan untuk tidak mengukurnya. *Humor* membantu mengubah kemarahan dan kesedihan menjadi kegembiraan. *Humor* menghendaki situasi yang konkrit, humor tidak muncul dalam situasi yang disajikan melalui pernyataan. Itu pula sebabnya sub aspek humor tidak diukur dalam penelitian ini.

Tujuan dan masa depan yang lebih baik merujuk pada kemampuan guru honorer menghayati memiliki kekuatan internal untuk mengarahkan pikiran dan tindakannya ke arah tujuan yang ingin diraih. Tujuan dan masa depan yang lebih baik ini memiliki empat sub aspek, yaitu *Goal Direction, Achievement Motivation, and Educational Aspirations, Optimism and Hope, Special, interest, creativity, and imagination*, dan *Faith spirituality sense of meaning*. *Goal Direction, Achievement Motivation, and Educational Aspirations* adalah kemampuan guru honorer merencanakan dan menyelesaikan sebuah masalah dengan suatu motivasi untuk menyikapi situasi dan isu yang ada, yang diarahkan untuk mencapai kesuksesan dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. *Optimism and Hope* adalah kemampuan guru honorer mengembangkan sikap-sikap optimistik untuk mencapai tujuan masa depan yang ingin diraih. *Special interest, creativity, and imagination* adalah ketertarikan individu secara khusus terhadap sesuatu, kreativitas adalah kemampuan berpikir orisinal dan berbeda, dan imajinasi adalah kemampuan membayangkan sesuatu yang abstrak. Bertolak dari pengertian ketiganya, memberikan pemahaman kepada penulis bahwa ketiganya tidak memungkinkan untuk diukur hanya melalui *item* melainkan memerlukan pengukuran tersendiri. Oleh karenanya, penulis memutuskan untuk tidak melakukan pengukurannya pada kesempatan ini. *Faith, spirituality, and sense of meaning* adalah menggambarkan kekuatan individu yang berasal dari agama, individu yang lain mendapat manfaat dari kerohanian atau iman secara umum, dan mencapai suatu stabilitas jawaban pribadi. *Faith, spirituality, and sense of meaning* merupakan kekuatan pribadi yang merepresentasikan kualitas



transfornasional tentang keyakinan akan satu kekuatan di luar dirinya, yang besar, dan tidak terbantahkan. Keadaan ini tidak cukup dapat diatasi melalui pernyataan dari item yang mengukur ketiga sub aspek ini, melainkan di tengah situasi yang tidak menentukan responden harus berbuat nyata untuk mengatasi keadaanya.

Guru honorer dihadapkan pada keadaan *adversity* berupa ketidakjelasan tentang bilakah status kepegawaiannya akan terselesaikan. Status kepegawaian yang tidak jelas ini berbanding lurus dengan perolehan penghasilan yang sangat kecil dan belum tentu secara rutin dapat diterima setiap bulan. Disisi lain, guru honorer berada dalam keadaan terancam setiap saat diputus hubungan kerjanya oleh pihak kepala sekolah dengan pelbagai alasan, atau bisa saja terjadi posisinya digantikan oleh guru lain.

Kemampuan guru honorer untuk beradaptasi terhadap situasi yang tidak menyenangkan ini akan tercermin melalui ke empat kategori atau aspek yang ada di dalam resiliensi. Guru honorer yang resilien berarti mampu memperlihatkan kompetensi sosial , yang diekpresikan melalui kemampuan untuk saling menjaga hubungan antar sesama profesi guru ditunjang dengan aspek kemandirian dirinya berupa pengetahuan dan kompetensi yang membuat guru honorer yakin terhadap profesi pilihannya , meskipun dihadapkan dengan berbagai *adversity* yang ada.

Kenyataan itu tidak menghalanginya untuk tetap memiliki kontrol sehingga guru honorer dapat terus berpikiran positif dan optimistis terhadap kemampuannya. Melalui kemandirian yang dimilikinya guru honorer seutuhnya dapat melaksanakan pelbagai hal yang ingin dilakukannya berkaitan dengan tugas

dan tanggung jawabnya karena memiliki ketertarikan dan komitmen atas keberadaannya sebagai guru honorer.

Berlandaskan kemandirian tersebut guru honorer akan membangun tujuan & masa depan yang lebih baik yang merupakan kekuatan untuk mengarahkan *goal* secara optimis dan kreatif yang berkaitan dengan penyusunan rencana-rencana untuk mencapai tujuannya menjadi PNS dan keterampilan memecahkan masalah untuk menghadapi *adversity* yang dialami guru honorer seperti memberi kontribusi positif untuk sekolah, mengikuti tes-tes CPNS, memperbaharui ilmu pengetahuannya, dan memupuk rasa optimis bahwa tujuannya pasti akan tercapai. Ini dapat berjalan baik bila ditunjang oleh kompetensi sosial guru honorer.

Ditunjang kompetensi sosial, guru honorer dapat memanfaatkan lingkungan sekitar yang dirasa dapat mendukung pemecahan masalahnya dan dapat beradaptasi secara positif. Misalnya dengan membangun komunikasi yang baik antar sesama guru dan antar guru dengan siswa, maka dapat terjadi pembaruan ilmu pengetahuan serta memperkuat kompetensi guru honorer sehingga guru honorer dapat mendidik siswanya supaya lebih berkembang, guru honorer juga mendapat pertukaran informasi seputar proses pengangkatan CPNS, berbagi pengalaman hidup seputar nasib menjadi guru honorer sehingga bisa lebih termotivasi memerjuangkan statusnya untuk menjadi PNS, lebih mensyukuri keadaan dirinya dan mengubah *adversity* yang dialaminya menjadi bentuk ibadah serta pengabdian sebagai pahlawan tanda jasa. Paparan ini mencerminkan guru honorer yang memiliki resiliensi tinggi.

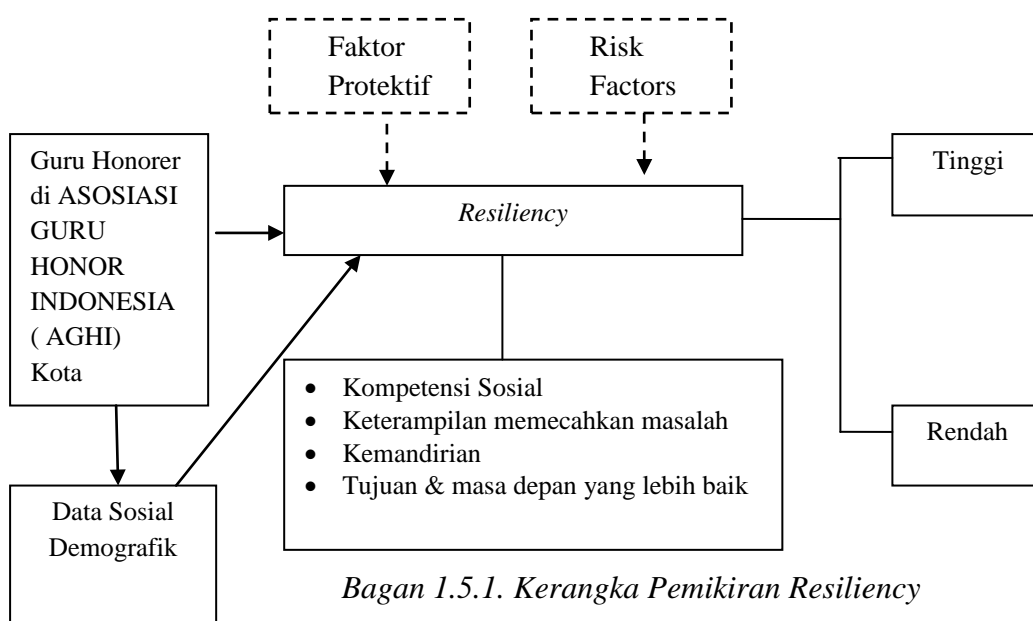
Keadaan berkebalikan dari kondisi di atas merupakan gambaran dari resiliensi yang rendah. Guru honorer dengan resiliensi rendah akan sulit untuk mengembangkan kompetensi sosial ke lingkungan, kurang dapat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, demikian pula kemandiriannya tidak dapat berkembang sehingga kian menyulitkannya untuk menumbuhkan orientasi positif dengan tujuan-tujuan positif bagi pengembangan karirnya di masa depan.

Kemampuan resiliensi pada guru honorer tidak lepas dari factor protektif yang mempengaruhinya yaitu *caring relationship*, *high expectations*, dan *opportunities for participation and contribution* yang diberikan melalui keluarga sekolah dan lingkungan (Bernad,2004). Disisi lain, teori resiliensi juga memerhitungkan faktor risiko. Faktor risiko merujuk pada pelbagai keadaan yang ada dalam kehidupan seseorang, yang dapat meningkatkan peluangnya untuk merasakan tekanan akibat situasi *adversity*. Dalam hal ini, faktor risiko pada guru honorer adalah keluarga dan sekolah tempat guru honorer mengabdikan dirinya sebagai guru.

Dalam penelitian ini, penulis tidak meneliti faktor risiko, mengingat faktor risiko sebenarnya telah menyatu dengan guru honorer sehubungan dengan tidak diperolehnya kesempatan untuk diangkat sebagai guru PNS. Sebagai kelengkapan data penelitian, penulis menggali data sosio-demografik. Data sosiodemografik tidak diturunkan melalui landasan konseptual, melainkan besumber dari segala sesuatu yang berkaitan dengan guru honorer sebagai pribadi. Data sosiodemografik juga tidak diposisikan sebagai factor yang memengaruhi, melainkan sebagai data untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang

responden yang diteliti. Adapun data sosiodemografi yang dijangkau adalah jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, status perkawinan, pekerjaan pasangan, lamanya menjadi guru honorer.

Secara skematis, kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut :



## 1.6 Asumsi

- Guru honorer yang tidak memiliki kejelasan status dapat ditafsirkan berada dalam situasi kurang menguntungkan atau mrenekan (*adversity*).
- Situasi kurang menguntungkan akan memicu munculnya resiliensi dalam derajat beragam.

- Derajat resiliensi akan menentukan seberapa mampu guru honorer beradaptasi dalam situasi yang *adversity*-nya.